



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

“SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH ”

Disampaikan dalam:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Oleh:
SONI SUMARSONO
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Samarinda, 17 Januari 2018



OUTLINE PEMBAHASAN



1. PERSIAPAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019



2. PENETAPAN PERDA RPJMD PILKADA SERENTAK



3. DATA DAN AREA RAWAN KORUPSI



4. KONDISI MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



5. ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RPJMD PILKADA SERENTAK



6. HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD PROV KALTIM



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH



1

Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan.

2

Diperlukan persamaan dan pemahaman persepsi.



BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI



1. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
3. Pelaksanaan sosialisasi;
4. Pelaksanaan pendidikan politik;
5. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
6. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pilkada dan pemilu;
7. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pilkada dan pemilu





KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PILEG & PILPRES 2019



Penyediaan Data
Kependudukan



Fasilitas
Kampanye



Pendistribusian &
pengamanan perlengkapan
pemungutan suara



Memberikan perlindungan
hukum dan keamanan
pada pemantau Pemilu

MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019



Political Cost



Motif Politik Uang



Provokasi



Isu-isu Hoax
Dan SARA



Kesadaran
Demokrasi



Langkah
Preventif



Kampanye
Hitam



Politik Identitas



Cara Kontestan
Memenangi
Kursi Pilpres dan
Pileg

TAHUN POLITIK





KESIAPAN PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019



1. Pemerintah telah menyediakan DP4 untuk kebutuhan Pemilu 2019
2. Jumlah Pemilih dan TPS
3. Pemilih, TPS dan Logistik
4. Daftar Pemilih Berkelanjutan
5. Pengadaan Logistik
6. Percetakan dan Distribusi Logistik
7. Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Kampanye
8. Hitung dan Rekap Suara
9. Netralitas Pegawai Negeri Sipil
10. Bentuk Bantuan Dan Fasilitas



DUKUNGAN KEMENDAGRI TERKAIT PERSIAPAN PELAKSANAAN PILEG & PILPRES



- 01 Dukungan Data Kependudukan
- 02 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- 03 Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pilpres
- 04 Dukungan Teknis Kelancaran Pilpres
- 05 Dukungan Peningkatan Partisipasi Pemilih
- 06 Menjaga Netralitas ASN





POTENSI KERAWANAN PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES



**Multi Tafsir
Atas UU**



**Konflik Internal
Parpol**



**Daftar Pemilih
Tetap (DPT)**



**Sabotase Logistik
Pileg Pilpres**



**Bentrokan Antar
Massa Pendukung Paslon**



**Praktek Politik
Uang**



**Teror/Ancaman
/Intimidasi**



**Mengulur Waktu
Penghitungan Suara**



**Penetapan
Pemenang Dan Hasil
Putusan MK**



LANGKAH STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI



01

**Deteksi Dini & Pemetaan Potensi Stabilitas
Yang Mempengaruhi Dinamika Politik
Lokal**

02

Pemanfaatan Modal Sosial

03

**Meningkatkan Komunikasi Dengan Tokoh
Masyarakat, Adat Dan Agama**

04

**Penguatan Fungsi Intelejen (Data/Info Yang
Akurat)**

05

**Pendidikan Sosial, Politik,
Dan Budaya Kepada Elemen
Masyarakat**





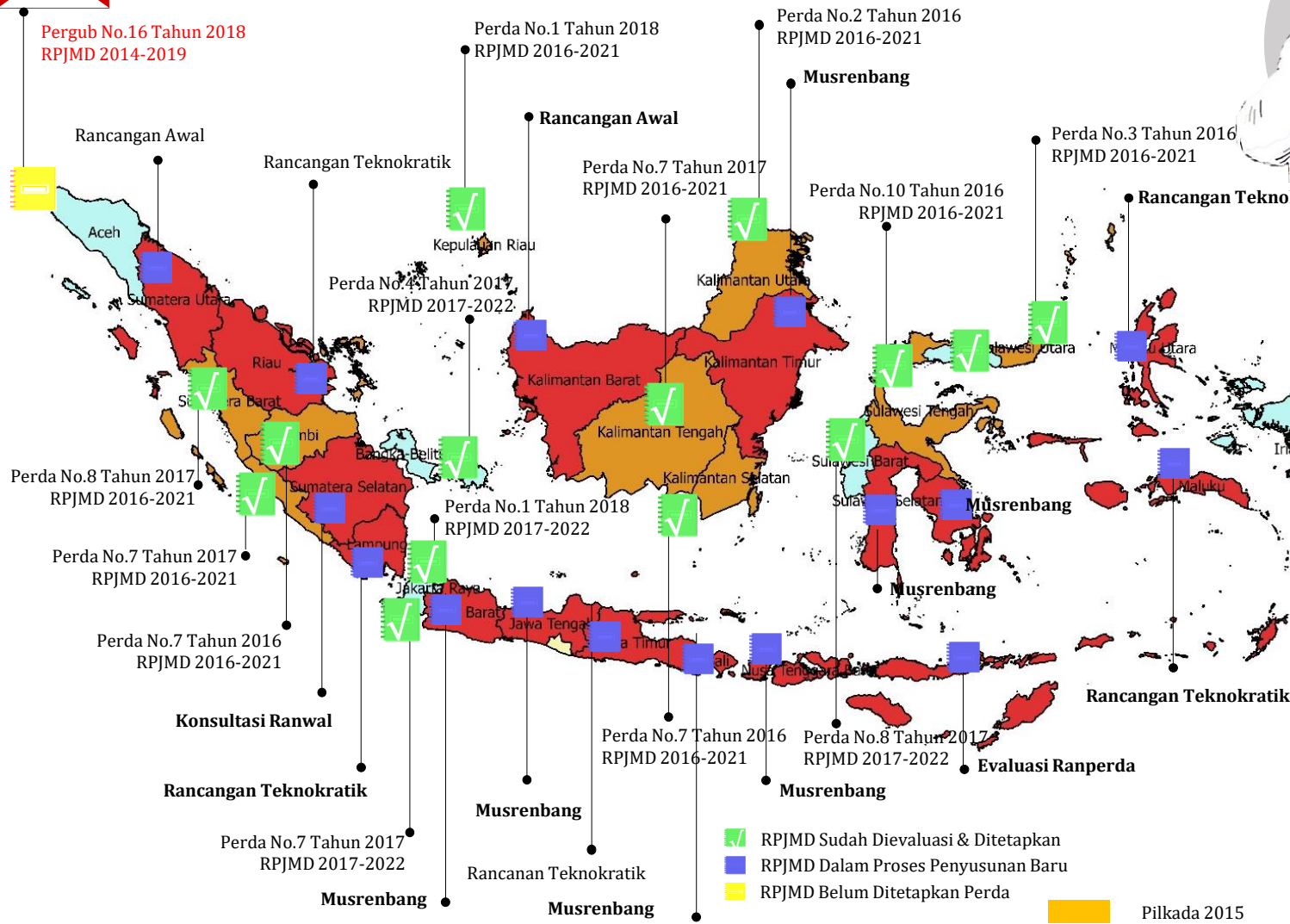
STATUS PERDA RPJMD PROVINSI Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017 Dan 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilantik, saat ini sedang menyusun RPJMD. Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 264 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014:

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



KDH yang sudah dilantik:

05 September 2018

1. Jawa Tengah
2. Kalimantan Barat
3. Sumatera Utara
4. Nusa Tenggara Timur
5. Jawa Barat
6. Sulawesi Selatan
7. Bali
8. Sulawesi Tenggara
9. Papua

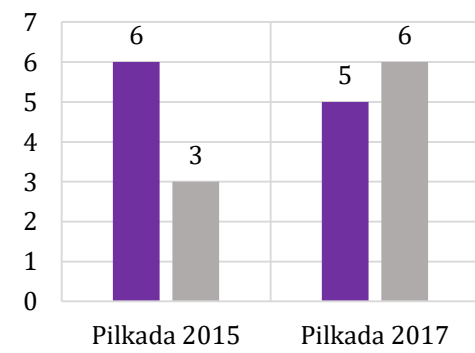
19 September 2018

1. Nusa Tenggara Barat

01 Oktober 2018

1. Kalimantan Timur
2. Sumatera Selatan

Evaluasi Penetapan Perda RPJMD





STATUS PERDA RPJMD KAB/KOTA

Provinsi Kaltim Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017 & 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



- Gubernur sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014, melakukan evaluasi terhadap Ranperda RPJMD Kab/Kota dan memastikan Perda RPJMD Kab/Kota ditetapkan tepat waktu.
- Gubernur perlu melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota.

Pilkada 2015

Kab/Kota Se-Kaltim (9 Kab/Kota)

- Kota Samarinda
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Kutai Barat
- Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Paser
- Kabupaten Berau

Pilkada 2017

Kab/Kota Se-Kaltim

-

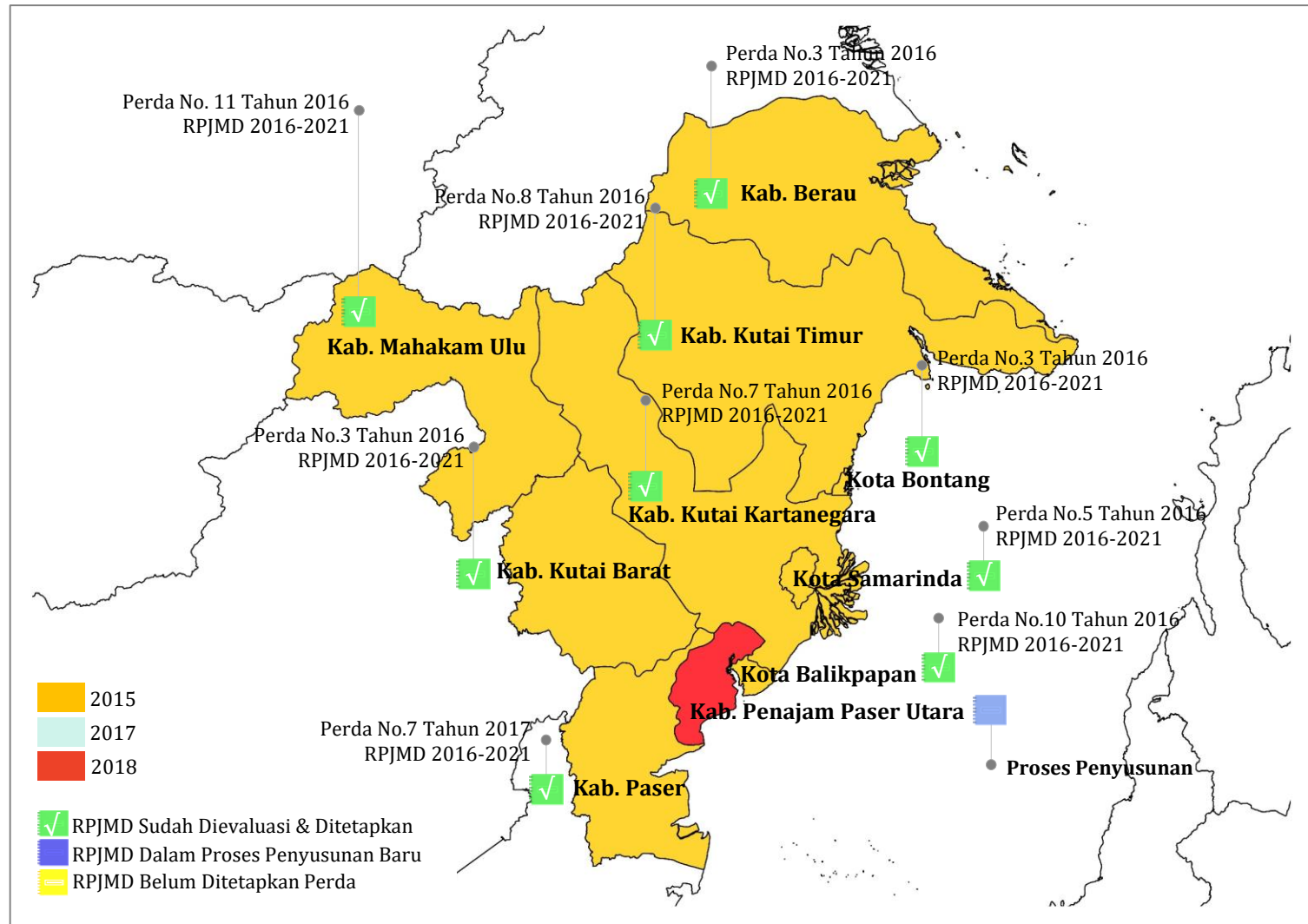
Pilkada 2018

Kab/Kota Se-Sultra (2 Kab/Kota)

- Kabupaten Penajam Paser Utara

❖ Pasal 6-7 UU 10 Tahun 2016

Pemungutan suara serentak Gub & Wagub, Bup & Wabup, serta Wal & Wawal hasil pemilihan **tahun 2015** dilaksanakan pada bulan **September tahun 2020. Menjabat sampai 2024.**





DATA KORUPSI DI INDONESIA Sejak Tahun 2004-2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Kasus 2018

Jenis Kasus	Kasus
Penyelidikan	127
Penyidikan	126
Persekusi	101
Inkracht	75
Eksekusi	80
Total	509

Kasus 2004-2018

Jenis Kasus	Kasus
Penyelidikan	1098
Penyidikan	814
Persekusi	669
Inkracht	547
Eksekusi	577
Total	3.705



Grafik Kasus Korupsi Tahun 2004-2018

(Status 30 September 2018)



Penanganan kasus dan jumlah kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi dan cenderung terus meningkat sejak tahun 2004 s.d. 2018. Data ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi kemajuan pemerintahan di Indonesia.



6 AREA RAWAN KORUPSI Di Pemerintahan Daerah



Upaya Pencegahan Korupsi

Untuk menanggulangi korupsi antara lain dilakukan melalui pembentukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (**Korsupgah**). **Korsupgah** dibentuk berdasarkan permintaan pendampingan dari daerah ke KPK untuk perbaikan tata kelola serta manajemen pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan perizinan yang transparan, efisien dan bersih dari praktik korupsi

Upaya Konsentrasi Korsupgah

Konten Umum

1. Penguatan APIP
2. Manajemen ASN
3. **E-Planning dan E-Budgeting**
4. Pengadaan Barang dan Jasa

Konten Lokal

1. Pengelolaan Aset
2. Pengelolaan Dana Desa
3. Pendapatan Asli Daerah
4. Sektor Strategis (Pendidikan dan Kesehatan)

Pajak &
Retribusi

Pengadaan
Barang & Jasa

Jual Beli
Jabatan

Belanja Hibah
& Bansos

Perencanaan &
Penganggaran

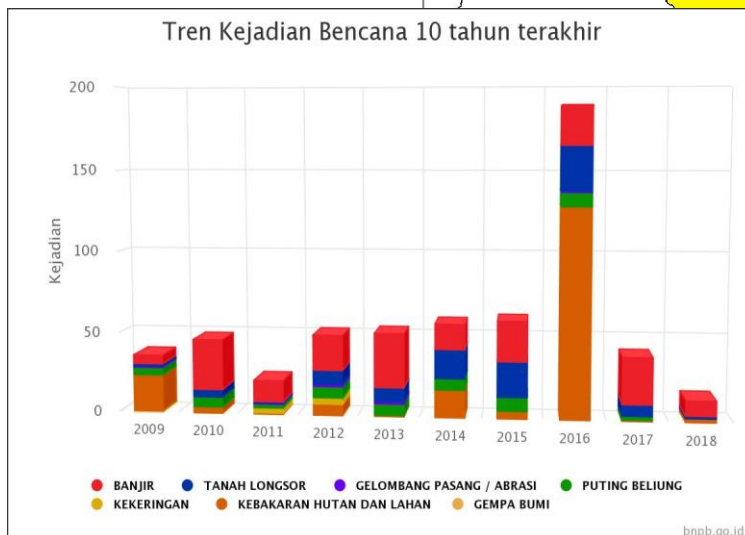
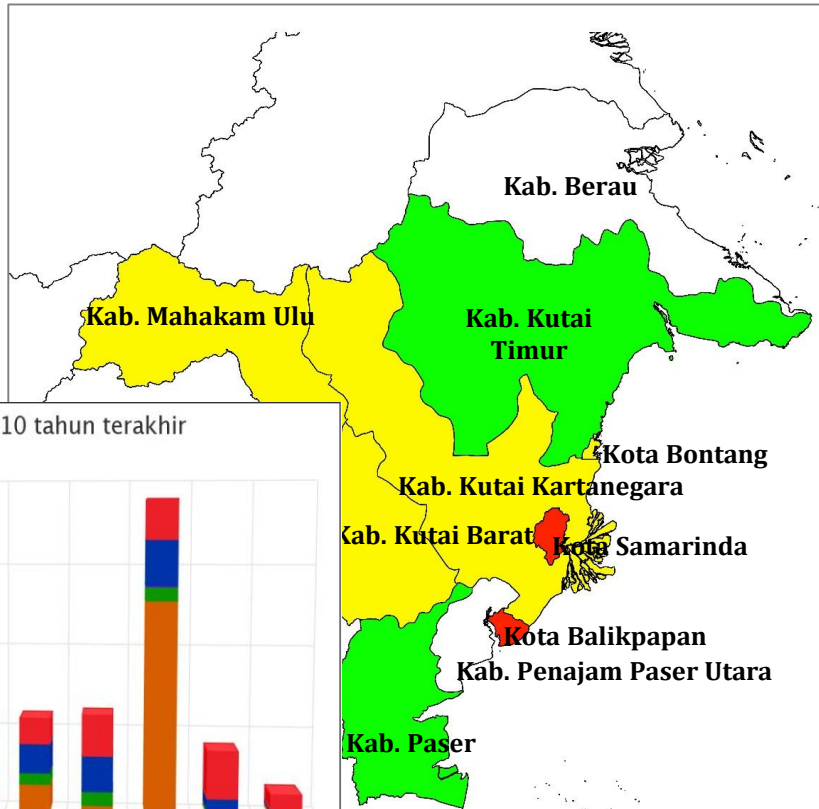
Belanja
Perjalanan
Dinas

**N
K
RUPSI**





WILAYAH RAWAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



■ Rendah/Low ■ Sedang/Moderate ■ Tinggi/High □ Tidak Ada Data

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2018 Diolah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



LANGKAH ANTISIPASI BENCANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



1. Mengenal dan melakukan indentifikasi serta pemetaan kondisi wilayah yang termasuk kedalam rawan bencana;
2. Memperhatikan kondisi wilayah rawan bencana dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Melakukan mitigasi bencana secara struktural (meningkatkan sarpras untuk mengurangi dampak bencana) maupun secara nonstruktural (meningkatkan kesadaran maupun kapasita masyarakat terhadap bahaya bencana)
4. Menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.



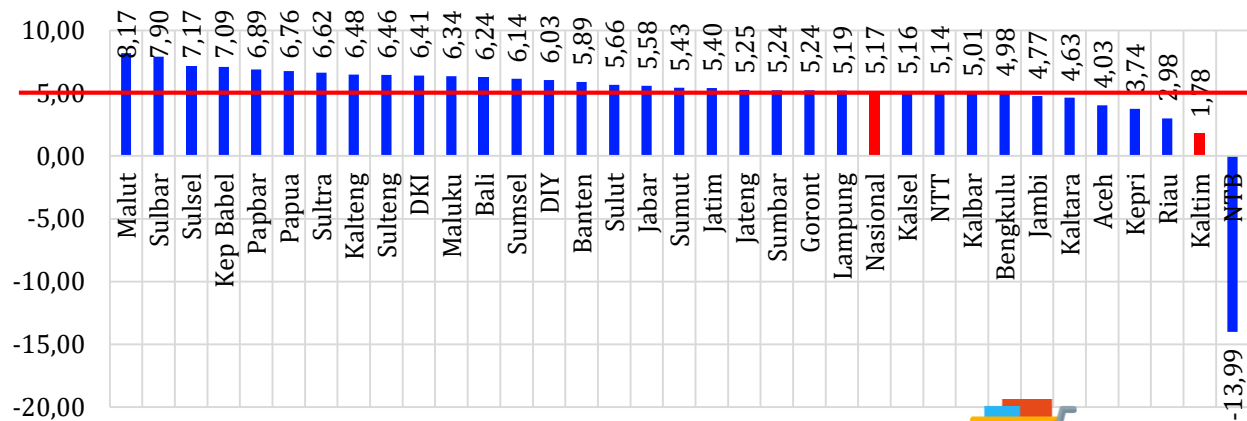


PERTUMBUHAN EKONOMI Provinsi Kalimantan Timur

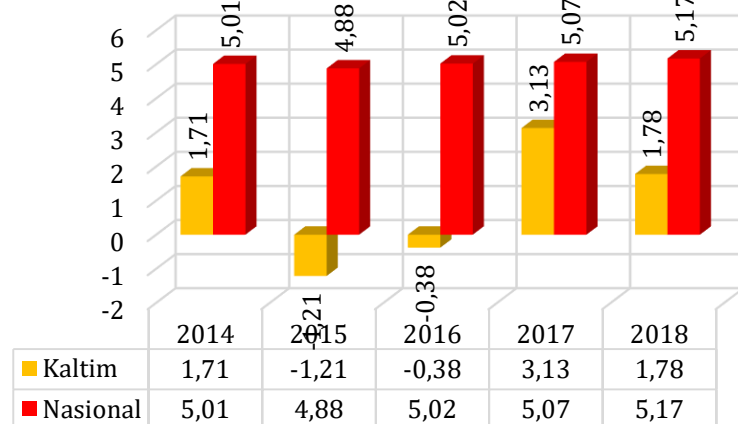
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia
Quartal III y on y Tahun 2018 (Persen)

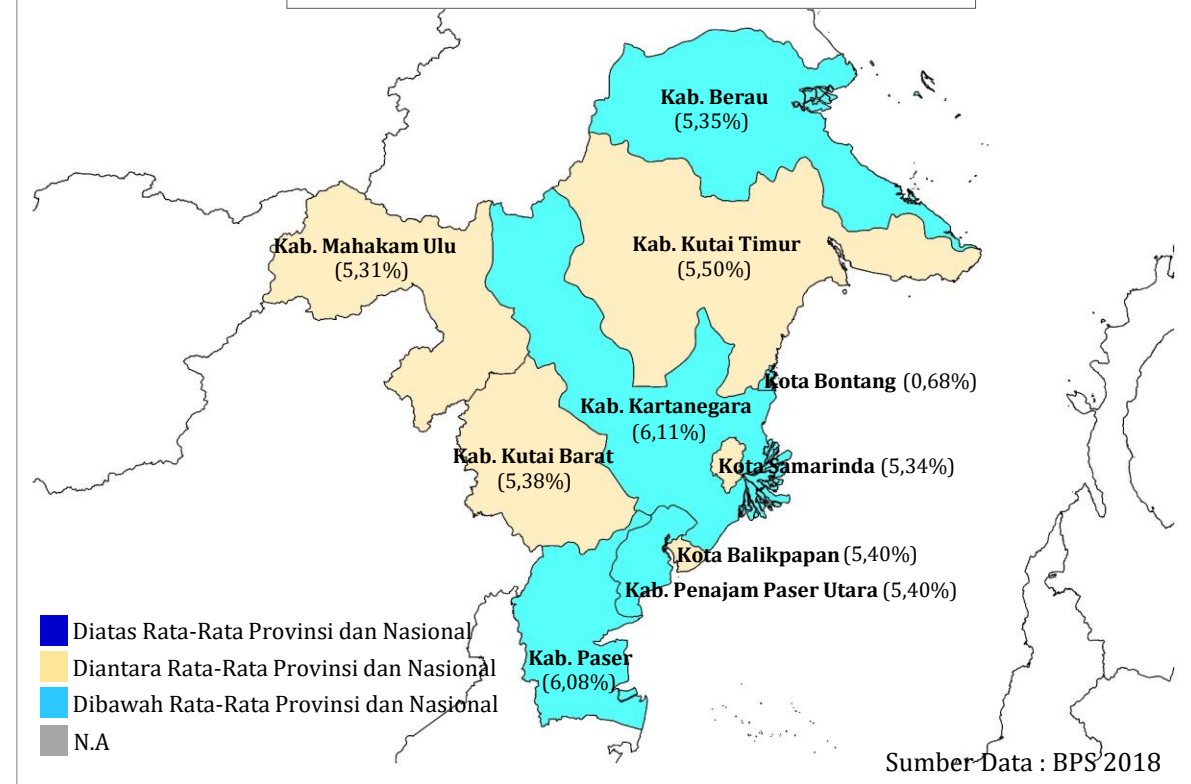


Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kaltim Dan Nasional
Tahun 2014- Quartal III y on y Tahun 2018 (Persen)



❖ Pertumbuhan ekonomi Kaltim Quartal III y on y Tahun 2018 tercatat sebesar 1,78% berada di peringkat 33 dari 34 provinsi sebesar dan berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar (5,17%). Tren pertumbuhan ekonomi Kaltim selama 5 tahun terakhir terlihat selalu berada di bawah rata-rata Nasional, dan terlihat mengalami penurunan. Berdasarkan kab/kota juga terlihat pertumbuhan ekonomi tidak ada yang berada diatas rata-rata Nasional. Adapun kab/kota dengan LPE terendah yakni Kab. Bontang, Paser, dan Kutai Kart. Oleh karena itu Pemprov diharapkan agar dapat mengoptimalkan sektor pengungkit LPE.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kaltim Tahun 2017



Sumber Data : BPS 2018

3 Kab/Kota Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Diatas Rata-Rata Nasional & Provinsi Kaltim
Tahun 2017 (Persen)

3 Kab/Kota Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Dibawah Rata-Rata Nasional & Provinsi Kaltim
Tahun 2017 (Persen)

Kab. Bontang
(0,68%)

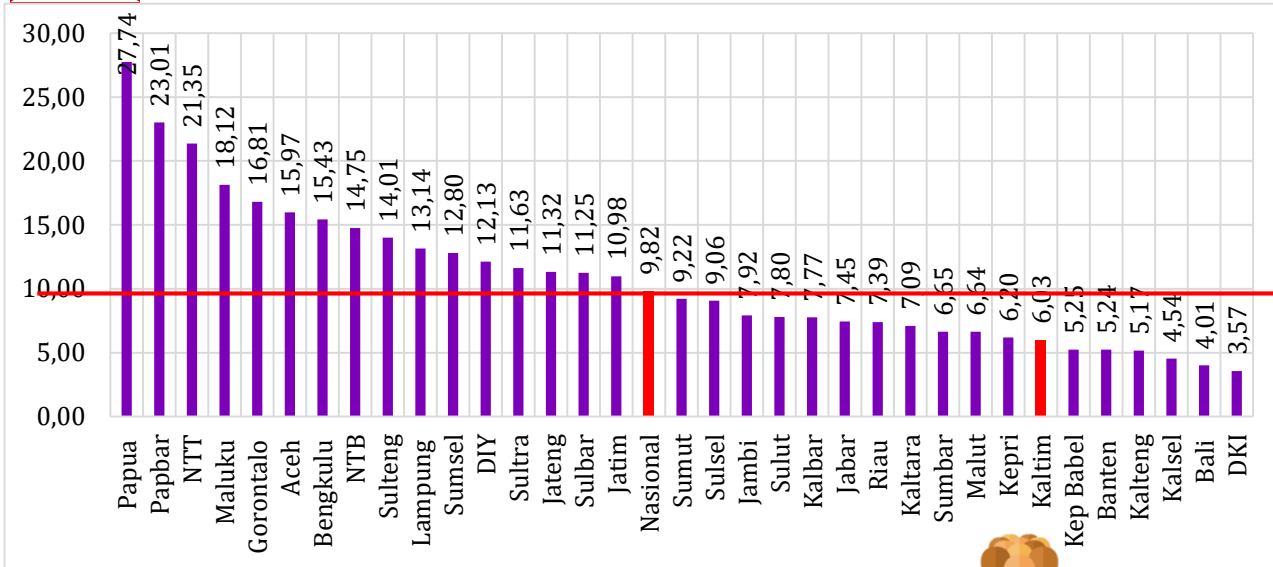
Kab. Paser
(1,13%)

Kab. Kutai
Kart.
(1,36%)

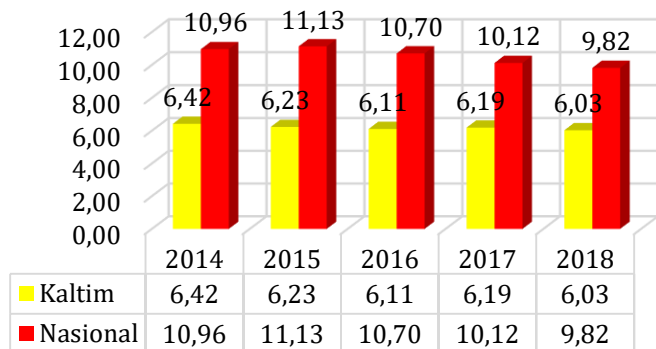


TINGKAT KEMISKINAN Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Kemiskinan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018 (Persen)



Tren Tingkat Kemiskinan Provinsi Kaltim
Dan Nasional Tahun 2014-2018 (Persen)

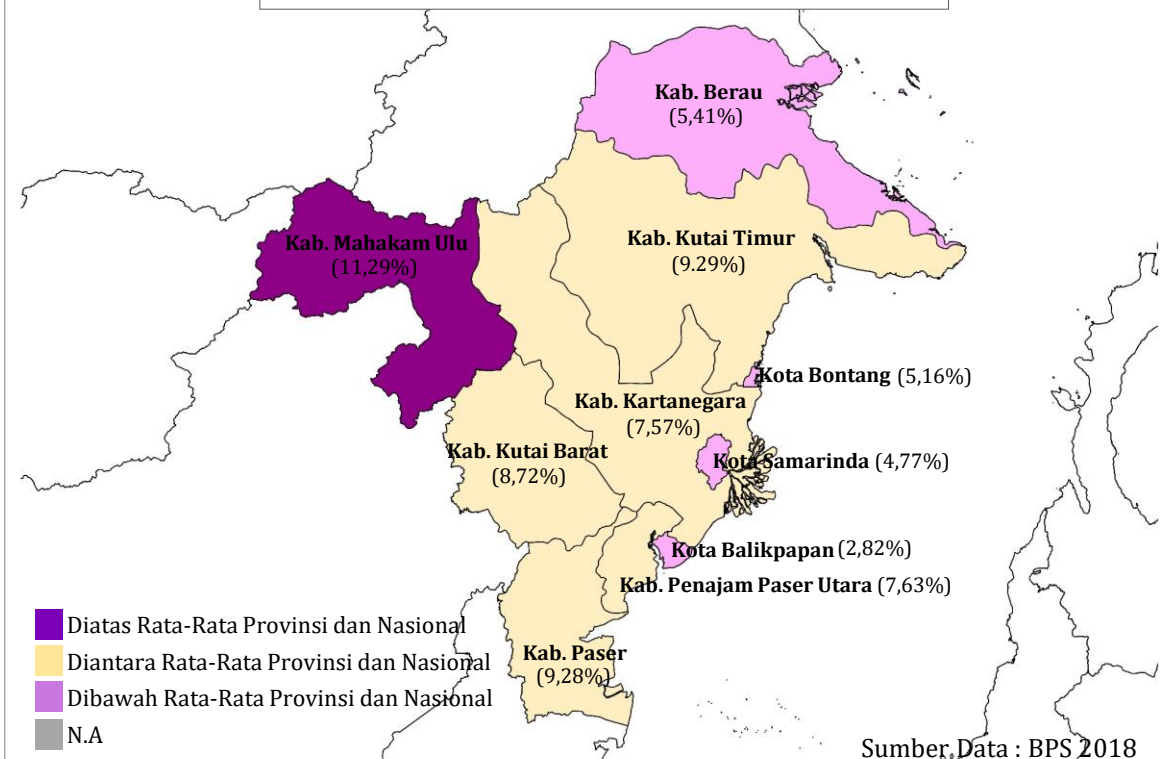


❖ Tingkat kemiskinan Kaltim tahun 2018 tercatat sebesar (6,03%) berada di bawah rata-rata Nasional yang sebesar (9,82%). Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Kaltim tahun 2014-2018 cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan kab/kota juga terlihat tingkat kemiskinan cukup rendah dan tergolong sangat baik. Hanya Kab Mahakam Ulu dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,29% dan berada diatas rata-rata Nasional.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kaltim Tahun 2017



3 Kab/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan
Diatas Rata Rata Nasional & Provinsi Kaltim
Tahun 2017 (Persen)

1
**Kab.
Mahakam Ulu**
(11,29%)

3 Kab/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan
Dibawah Rata Rata Nasional & Provinsi Kaltim
Tahun 2018 (Persen)

1
**Kota
Balikpapan**
(2,28%)

2
**Kota
Samarinda**
(4,77%)

3
Kota Bontang
(5,16%)

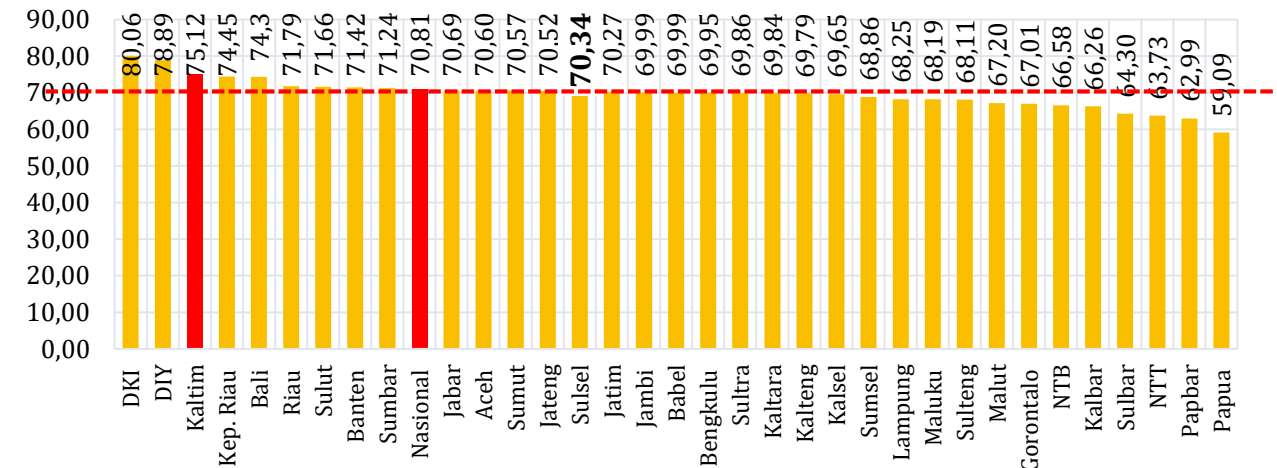


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Provinsi Kalimantan Timur

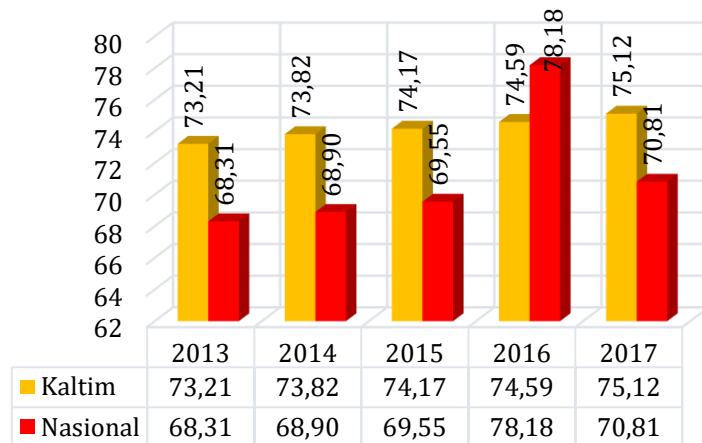
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2017 (Persen)

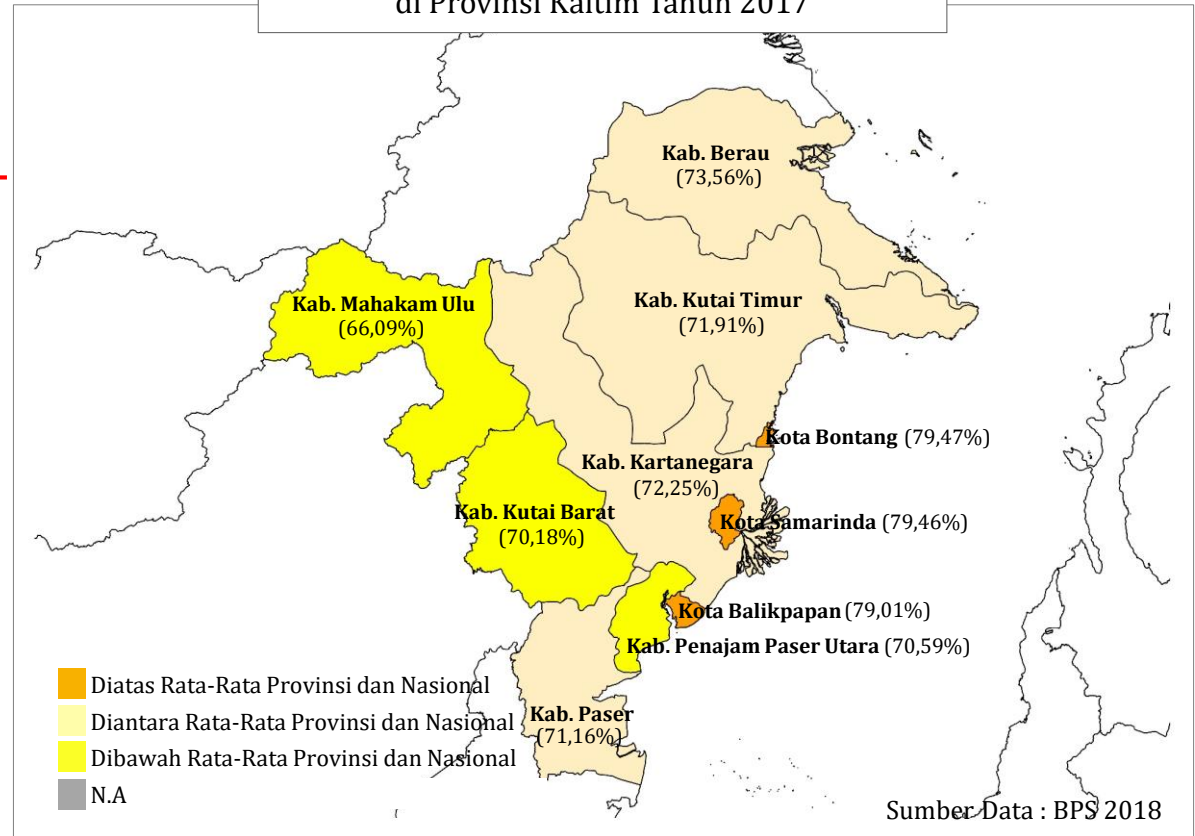


Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kaltim Dan Nasional Tahun 2013-2017 (Persen)

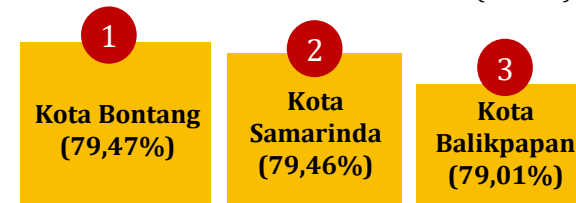


❖ IPM Kaltim tahun 2017 tercatat sebesar (75,12%) berada diatas rata-rata Nasional (70,81%) termasuk dalam kategori tinggi. Dari 34 provinsi di indonesia Kaltim menempati peringkat ke 3 IPM tertinggi. Berdasarkan trend selama 2013-2017, IPM Kaltim terus mengalami kenaikan yang signifikan dan selalu berada di atas rata-rata Nasional. Jika dilihat berdsarkan kab/kora, terdapat 3 kota yang berada di atas rata rata Nasional & Prov Kaltim yakni Bontang, Samarinda dan Balikpapan.

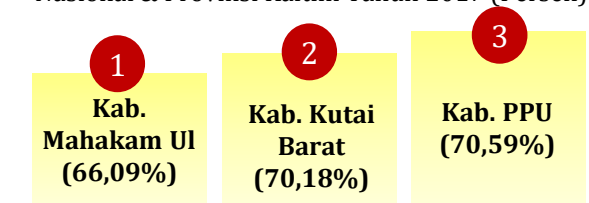
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota
di Provinsi Kaltim Tahun 2017



3 (Tiga) Kab/Kota dengan IPM Diatas Rata-Rata Nasional & Provinsi Kaltim Tahun 2017 (Persen)



3 (Tiga) Kab/Kota dengan IPM Dibawah Rata-Rata Nasional & Provinsi Kaltim Tahun 2017 (Persen)



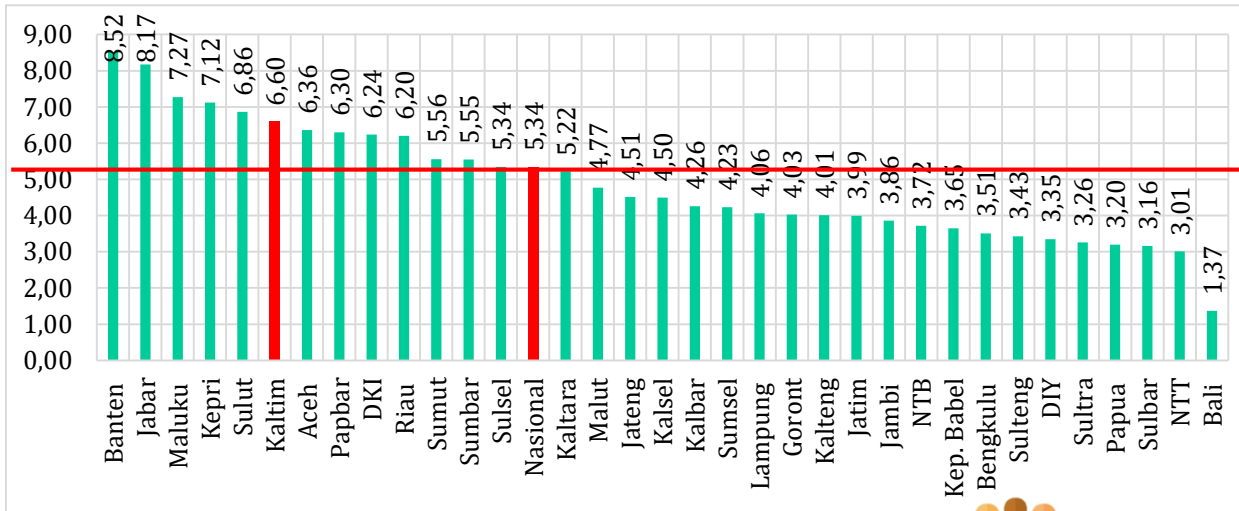


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) Provinsi Kalimantan Timur

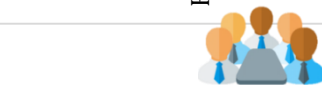
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



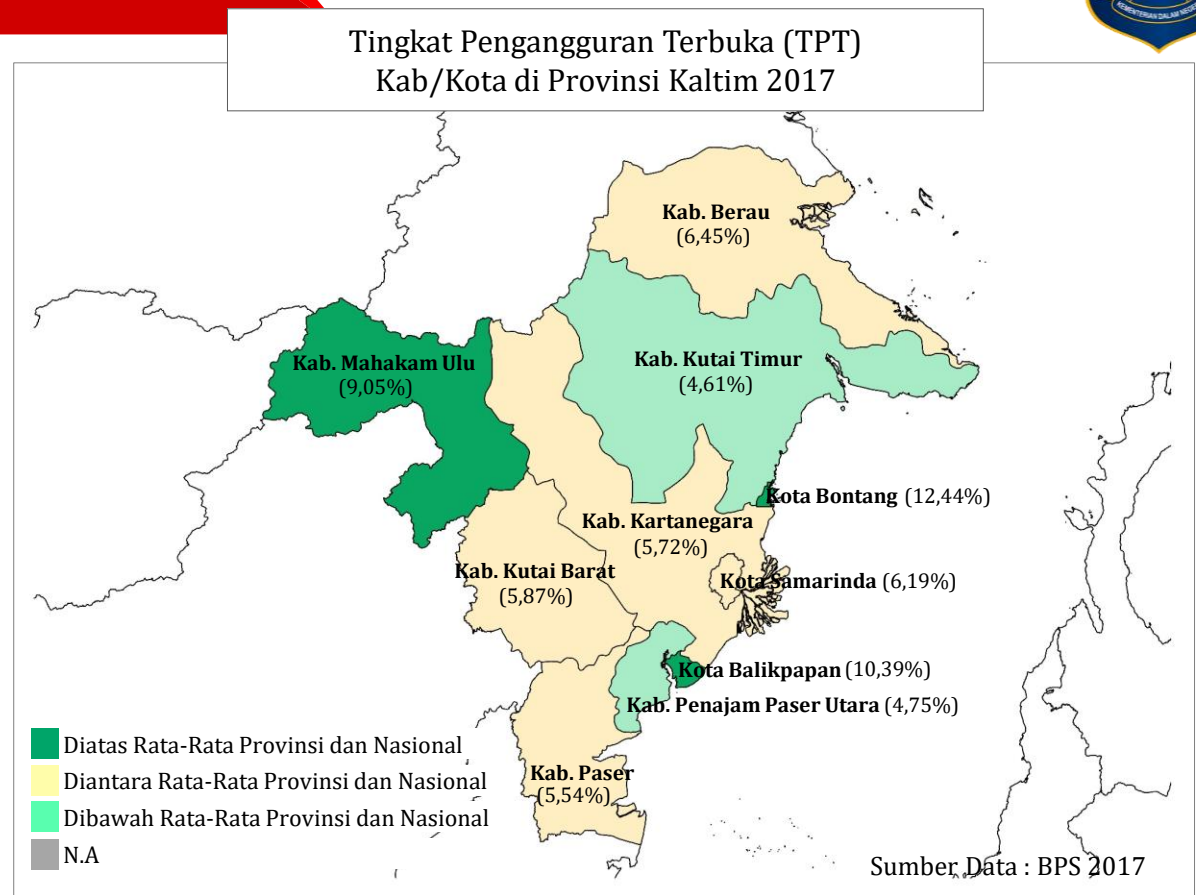
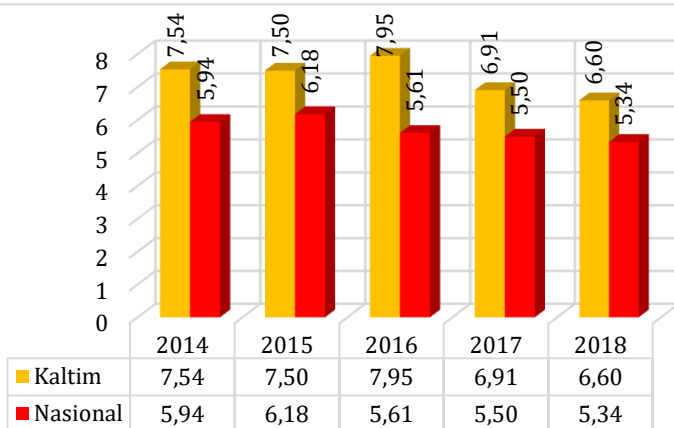
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Seluruh Indonesia
Per-Agustus 2018 (Persen)



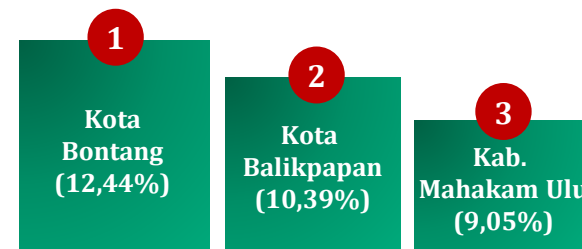
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltim
Dan Nasional Tahun 2014-Agustus 2018 (Persen)



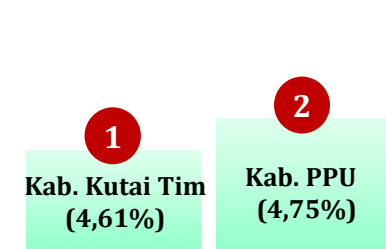
TPT Kaltim tahun 2018 tercatat sebesar (6,60%) berada di atas rata-rata Nasional sebesar (5,34%). TPT Kaltim 2018 menempati urutan ke 6 TPT tertinggi dari 34 provinsi. Berdasarkan tren TPT tahun 2014-Agustus 2018 terlihat mengalami penurunan dan kenaikan dan selalu berada di atas rata-rata Nasional. Jika dilihat berdasarkan kab/kota, terdapat 3 kab/kota dengan TPT diatas rata rata Nasional dan Prov Kaltim yakni Kota Bontang, Balikpapan dan Kab Mahakam Ulu. TPT terendah yakni Kab. Kutai Tim dan PPU.



3 Kab/Kota TPT Diatas Rata Rata
Nasional & Provinsi Kaltim 2017 (Persen)



3 Kab/Kota TPT Dibawah Rata Rata
Nasional & Provinsi Kaltim 2017 (Persen)



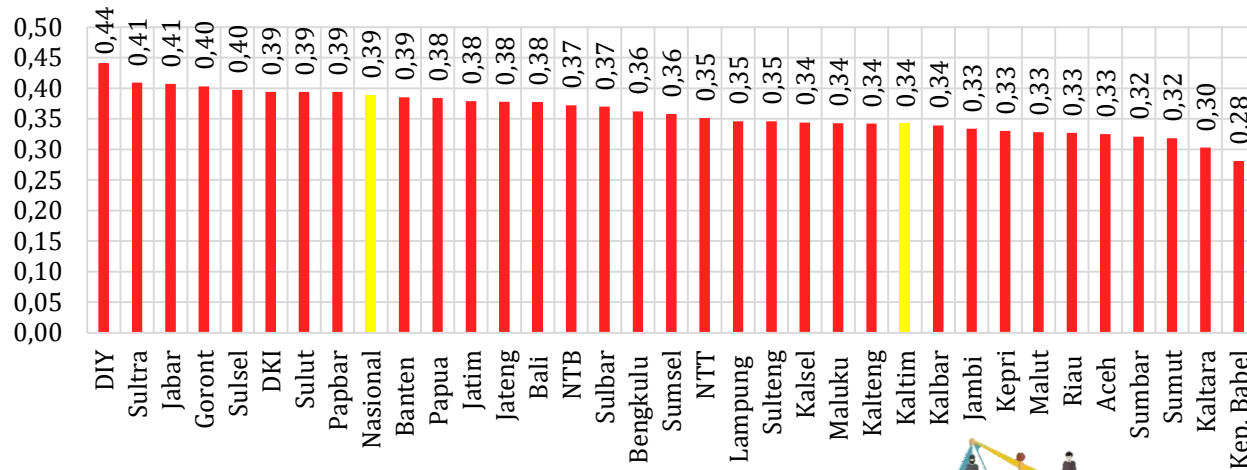


GINI RATIO Provinsi Kalimantan Timur

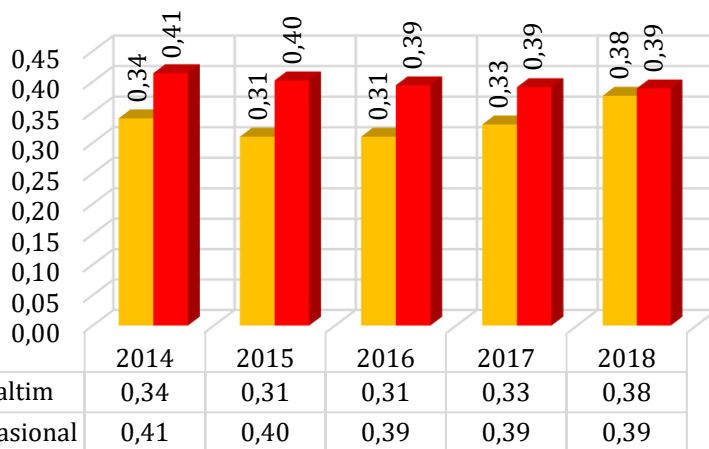
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Gini Ratio Provinsi Seluruh Indonesia Maret 2018

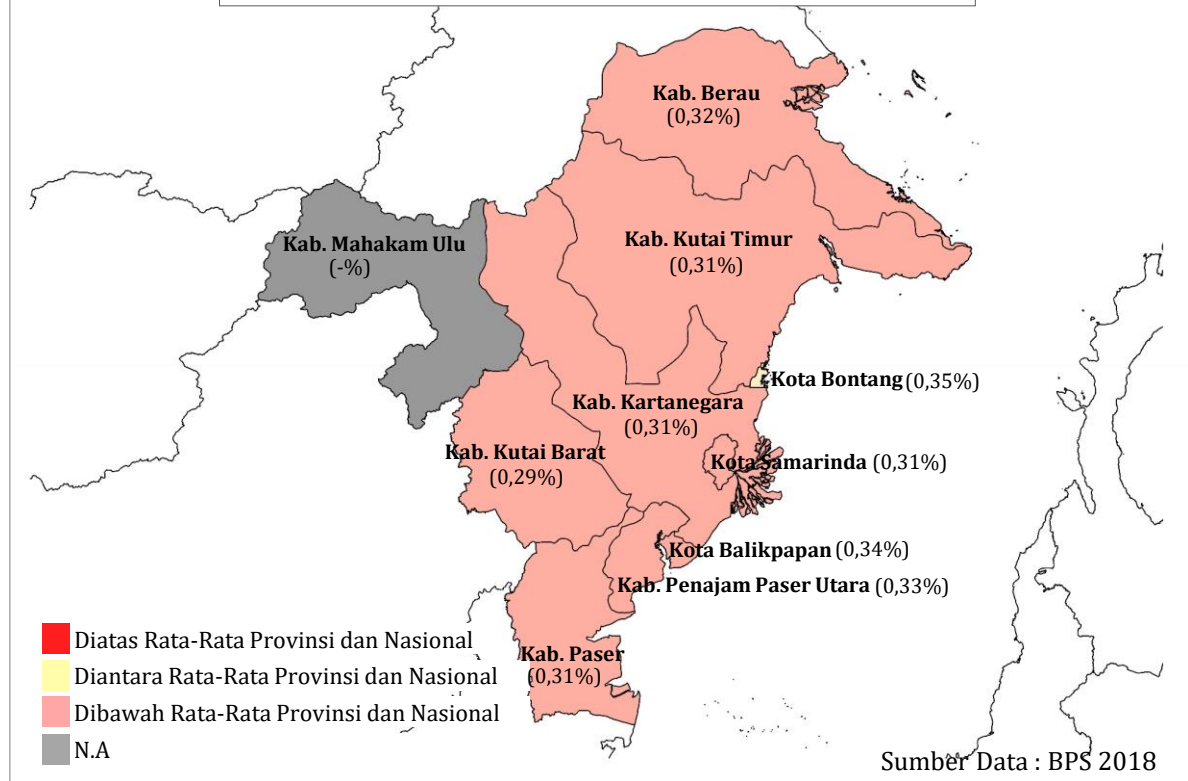


Gini Ratio Provinsi Kaltim
Dan Nasional Tahun 2014-Maret 2018



Gini ratio Kaltim Maret Tahun 2018 sebesar (0,34) berada dibawah rata-rata nasional (0,39). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Kaltim masuk pada kategori sedang. Berdasarkan tren gini ratio Kaltim dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2014-Maret 2018 terlihat mengalami penurunan dan kenaikan dan selalu berada dibawah rata-rata nasional dan masuk pada kategori sedang. Kondisi yang sama juga dialami oleh seluruh kab/kota Kaltim pada tahun 2014 dengan Gini ratio dibawah rata-rata nasional.

Gini Ratio Kab/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2014



Sumber Data : BPS 2018

3 Kab/Kota Gini Ratio Diatas Rata Rata
Nasional & Provinsi Kaltim 2014

3 Kab/Kota Gini Ratio Dibawah Rata Rata
Nasional & Provinsi Kaltim 2014

1

Kab.
Kutai Barat
(0,29)

2

Kab.
Samarinda
(0,31)

3

Kab.
Kutai Tim
(0,31)



PENETAPAN PERDA APBD

Provisni & Kab/Kota Se-Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



NO	DAERAH	2014	2015	2016	2017	2018
	Prov. Kalimantan Timur	30 Desember 2013	22 Desember 2014	23 Desember 2015	25 Januari 2017	29 Desember 2017
1	Kab. Berau	11 Desember 2013	24 Desember 2014	28 Desember 2015	23 Desember 2016	27 Desember 2017
2	Kab. Kutai Barat	31 Desember 2013	23 Desember 2014	23 Desember 2015	30 Desember 2016	27 Desember 2017
3	Kab. Kutai Kertanegara	24 Desember 2013	23 Desember 2014	29 Desember 2015	03 Februari 2017	28 Desember 2017
4	Kab. Kutai Timur	31 Desember 2013	08 Januari 2015	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017
5	Kab. Mahakam Ulu	31 Desember 2013	29 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017
6	Kab. Paser	31 Desember 2013	29 Desember 2014	30 Desember 2015	29 Desember 2016	28 Desember 2017
7	Kab. Penajam Paser Utara	03 Februari 2014	31 Desember 2014	31 Desember 2015	07 Februari 2017	29 Desember 2017
8	Kota Balikpapan	30 Desember 2013	24 Desember 2014	22 Desember 2015	30 Desember 2016	30 Desember 2017
9	Kota Bontang	31 Desember 2013	31 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Desember 2016	28 Desember 2017
10	Kota Samarinda	07 Januari 2014	31 Desember 2014	07 Maret 2016	07 Februari 2017	28 Desember 2017

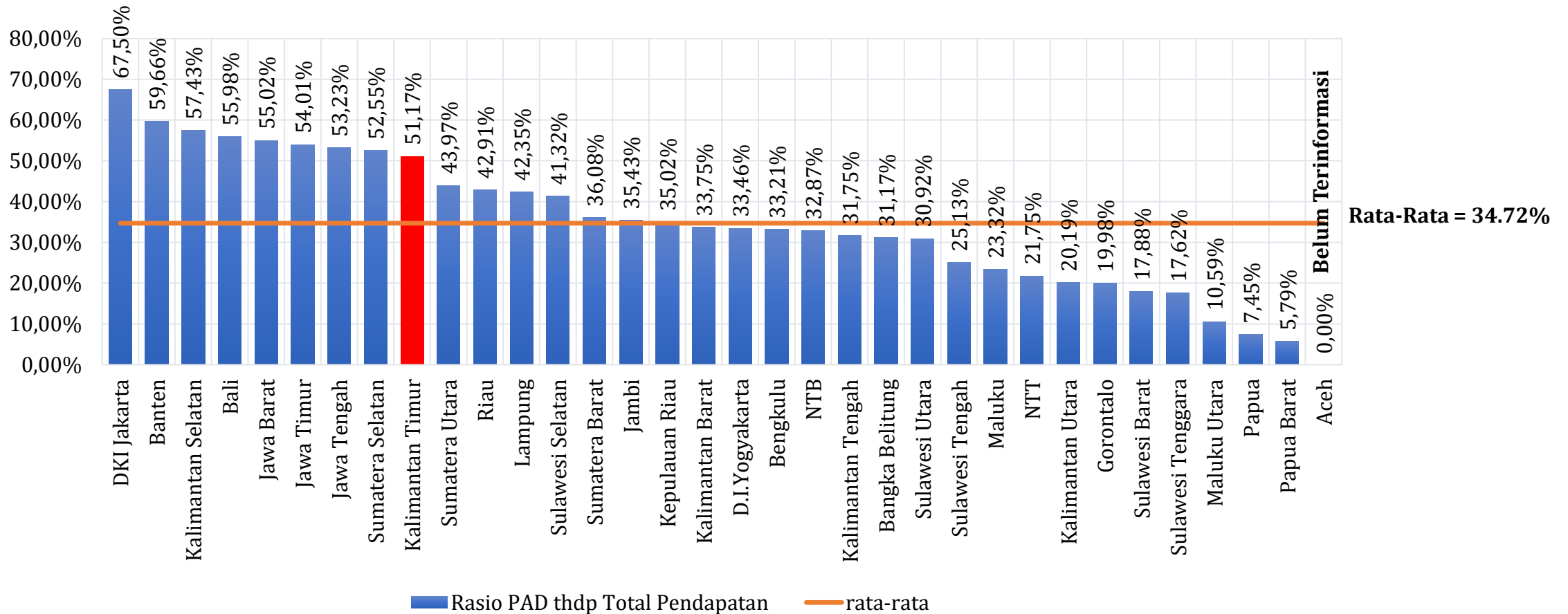
Keterangan:

Tepat Waktu (sebelum 31 desember)

Tidak Tepat Waktu (setelah 31 desember)



DERAJAT OTONOMI FISKAL PROVINSI (Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan TA 2018)



- Rasio PAD terhadap total pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 51,17 % berada di atas rata-rata Nasional (34,72%).



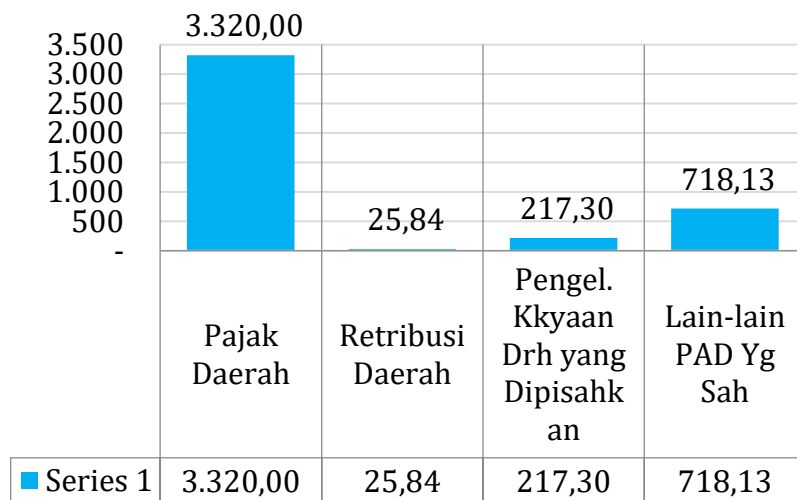
PERSENTASE PENDAPATAN APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

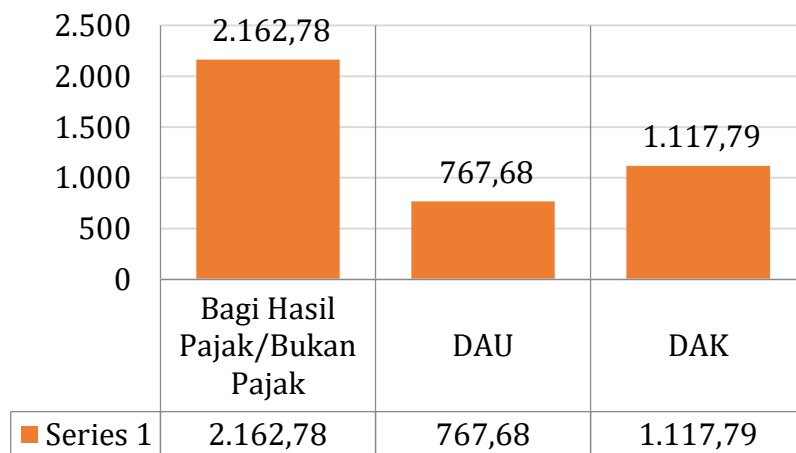


Miliar Rupiah

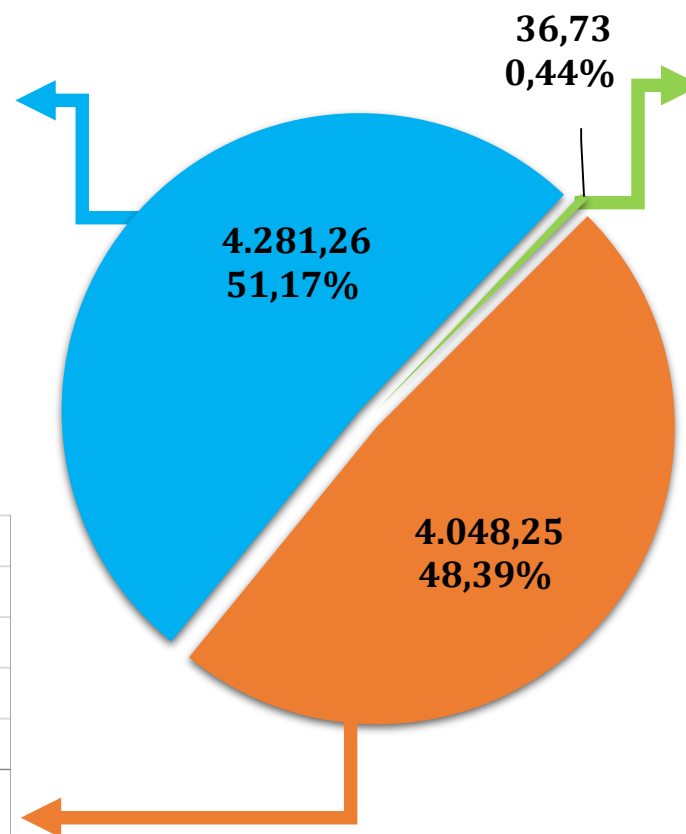
Pendapatan Asli Daerah



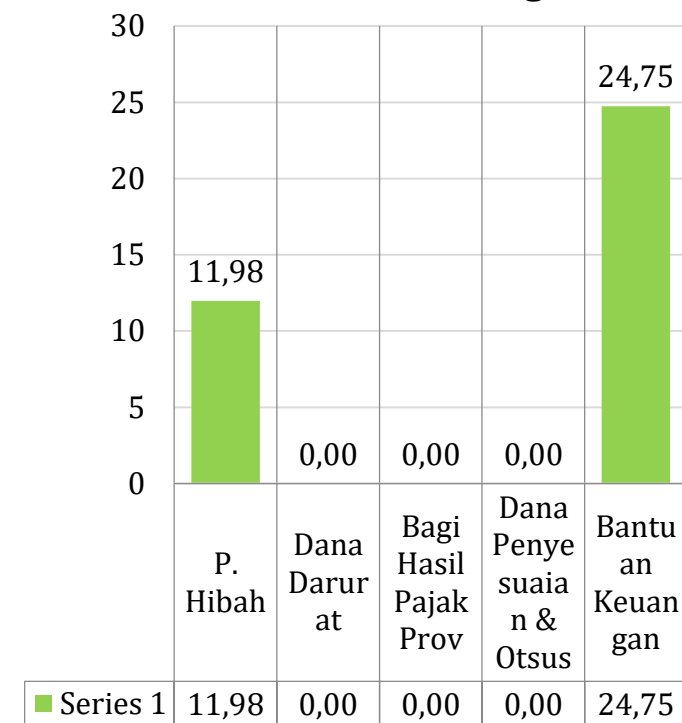
Dana Perimbangan



Total Pendapatan: 8,366.25



Lain-Lain PAD Yang Sah



■ Dana Perimbangan
■ PAD
■ Lain-Lain PD Yang Sah



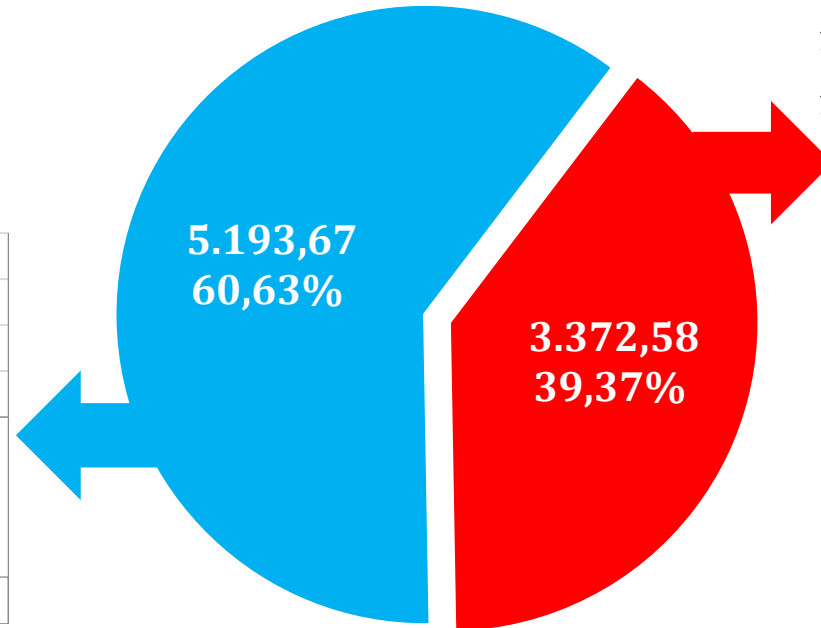
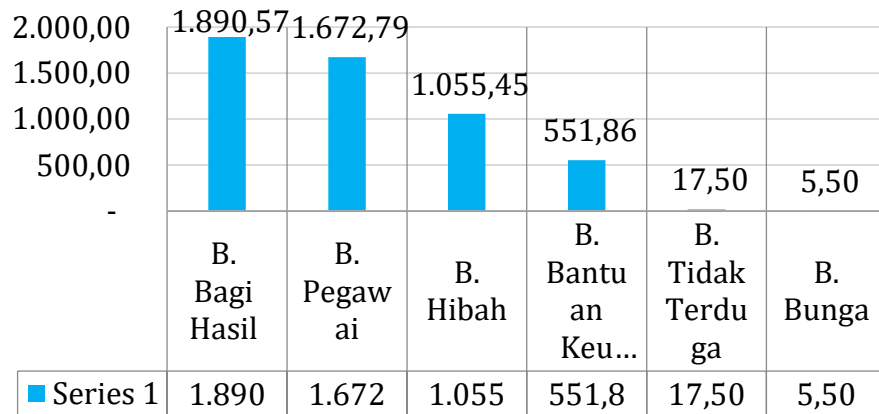
PERSENTASE BELANJA APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

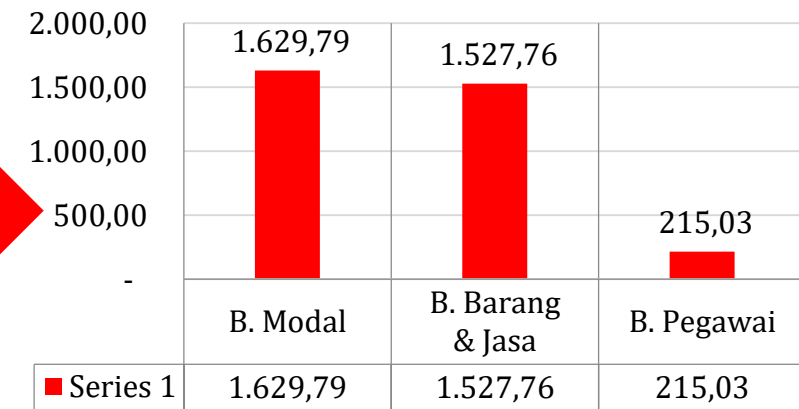


Miliar Rupiah
Total Belanja: 8,566.25

Belanja Tidak Langsung



Belanja Langsung



■ Belanja Tidak Langsung
■ Belanja Langsung

- **Belanja Langsung sebesar 39,37 % lebih kecil dari Belanja Tidak Langsung sebesar 60,63%.** Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah harus mampu menargetkan agar pelayanan publik lebih baik perlu mendorong untuk mengurangi belanja pegawai.



ISU STRATEGIS PENYUSUNAN RPJMD Daerah Pemilukada Serentak

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRW

Program yang disusun dalam dokumen RPJMD harus berpedoman kepada RTRW yang didasarkan pada Asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.



RPJMN Teknokratik

Dasar penyusunan RPJMD perlu memperhatikan RPJMN Teknokratik yang sedang disusun oleh Bappenas



SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal



KLHS

Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/kebijakan, rencana, dan/atau program



PENGEMBANGAN SIPD

Penyusunan RPJMD menggunakan Sistem e-planning sesuai Permendagri 98 Tahun 2018





HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



01

Data yang disajikan minimal berupa data statistik dasar dan pencapaian setiap target urusan yang menjadi kewenangan Prov, serta Semua urusan harus memiliki kinerja kunci (Indikator Pembangunan)

02

Perlu disandingkan data aspek kesmas, aspek yanum, dan aspek daya saing daerah dengan data nasional.

03

Perlu disajikan data proyeksi keuangan selama 5 tahun kedepan

04

Perlu dijelaskan rumusan permasalahan pemb. berdasarkan hasil analisis kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan yg ditetapkan dengan standar internasional, nas, & regional

05

Perlu ditambahkan isu strategis antara lain: reformasi agraria, penyelesaian konflik pertanahan, pengadaan pertanahan, SDGs, dan bertambahnya luas kawasan konservasi perairan.

06

Pencantuman target pada indikator tujuan cukup mencantumkan target pada kondisi awal dan akhir.

07

Perlu dilengkapi target-target yang masih kosong pada program pembangunan daerah.

08

Agar dipastikan semua program dari Renstra PD sudah termuat dalam RPJMD, target perlu memperhatikan SPM, SDGs, serta melengkapi target indikator outcome yang masih kosong.



TERIMA KASIH ²⁵